

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Marindo Zaini Panggabean

Npp. 32.0783

Asdaf Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Studi Keuangan Publik

Email: 32.0783@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Tun Huseno, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Although Paser Regency has consistently achieved an Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board of Indonesia (BPK) in the last ten years, various notes and findings related to weaknesses in the presentation of financial reports are still found. These problems include inaccuracy in recording assets, undercollection of regional taxes, and overpayment of inventory expenditures, which indicate that the implementation of SAP has not been fully optimized. **Purpose:** To analyze in depth the implementation of Government Accounting Standards (SAP) in the Paser Regency Regional Government, East Kalimantan Province, and its impact on the quality of regional financial reports. **Method:** Using a descriptive qualitative approach with data collection methods through direct observation, semi-structured interviews with key informants from the Regional Finance and Asset Agency (BKAD), and documentation studies of financial reports and Audit Result Reports (LHP) of BPK. The research focuses on four main indicators of financial report quality based on SAP: relevance, reliability, understandability, and comparability. **Result:** In general, the financial report of Paser Regency has met the SAP requirements, but there are still technical obstacles in its implementation. The main obstacles lie in the competence of human resources, limited information technology, and lack of internal supervision. The Paser Regency Government has made various improvement efforts such as revising accounting policies, technical training of HR, and optimizing the regional financial information system. **Conclusion:** This study concludes that the implementation of Government Accounting Standards (SAP) in Paser Regency significantly contributes to improving the quality of financial reports, especially in terms of relevance, reliability, ease of understanding, and comparability. However, the effectiveness of SAP implementation is still not optimal due to several inhibiting factors, so that the quality of the report is not fully maximized. The Paser Regency Government needs to continue to improve the competence of its apparatus through ongoing training, strengthening the internal control system, and updating the financial information system so that SAP implementation can run more consistently, accurately, and transparently.

Keywords: Government Accounting Standards, Financial Reports, Local Government, Paser Regency, Financial Report Quality, Accountability

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Meskipun Kabupaten Paser secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sepuluh tahun terakhir, masih ditemukan berbagai catatan dan temuan terkait kelemahan dalam penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut meliputi ketidaktepatan dalam pencatatan aset, kekurangan pemungutan pajak daerah, serta kelebihan pembayaran belanja persediaan, yang mengindikasikan bahwa implementasi SAP belum sepenuhnya optimal. **Tujuan:** Menganalisis secara mendalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan daerah. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Penelitian difokuskan pada empat indikator utama kualitas laporan keuangan berdasarkan SAP: relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. **Hasil:** Secara umum laporan keuangan Kabupaten Paser telah memenuhi ketentuan SAP, namun masih terdapat kendala teknis dalam penerapannya. Kendala utama terletak pada kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan teknologi informasi, dan kurangnya pengawasan internal. Pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan berbagai upaya perbaikan seperti revisi kebijakan akuntansi, pelatihan teknis SDM, dan optimalisasi sistem informasi keuangan daerah. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kabupaten Paser secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, khususnya dalam aspek relevansi, keandalan, kemudahan pemahaman, dan keterbandingan. Namun, efektivitas penerapan SAP masih belum optimal akibat beberapa faktor penghambat, sehingga kualitas laporan belum sepenuhnya maksimal. Pemerintah Kabupaten Paser perlu terus meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memutakhirkan sistem informasi keuangan agar implementasi SAP dapat berjalan lebih konsisten, akurat, dan transparan.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Kabupaten Paser, Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) merupakan landasan fundamental bagi keberlangsungan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks keuangan negara, prinsip ini diterjemahkan ke dalam sistem pengelolaan yang berlandaskan pada asas akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, serta adanya pengawasan yang independent (Arifiyanti & Komedi, 2019). Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa sistem keuangan negara harus diatur dengan undang-undang demi menciptakan pengelolaan

keuangan negara yang tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab (Rahayu et al., 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah peraturan sebagai upaya memperkuat sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Semua peraturan tersebut menekankan pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh entitas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Sinurat et al., 2024).

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Laporan ini harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Yanto, 2023). SAP dimaksudkan sebagai acuan teknis dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, sehingga kualitas informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal (Zuo, 2022).

Dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang benar-benar mencerminkan realitas pengelolaan keuangan. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun dalam sepuluh tahun terakhir Kabupaten Paser berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan berarti tidak ada permasalahan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan (Rinto Syahdan et al., 2022). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022 dan 2023, ditemukan sejumlah temuan seperti pemungutan pajak yang belum maksimal, kelebihan pembayaran belanja persediaan, hingga pelaksanaan kegiatan fisik yang belum memberikan manfaat optimal (Grassa, 2020).

Masalah-masalah tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara prinsip penyajian laporan keuangan yang ideal dengan implementasi di lapangan. Ini menunjukkan bahwa opini WTP tidak serta merta mencerminkan bebasnya suatu laporan dari kekeliruan administratif atau substansial. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana sebenarnya penerapan SAP di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Paser, serta sejauh mana penerapan tersebut memengaruhi kualitas LKPD (Rounaghi, 2019).

Pemerintah Kabupaten Paser sendiri telah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan, seperti melalui penetapan kebijakan akuntansi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015. Namun demikian, perbaikan regulasi saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan penguatan pada aspek teknis dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan SAP dilaksanakan secara riil dan tantangan apa saja yang dihadapi (Grossi et al., 2023).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis secara menyeluruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Kabupaten Paser dan menilai dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Paser dan pemerintah daerah lainnya dalam memperbaiki sistem pelaporan keuangan, serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi di bidang akuntansi sektor publik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering kali dianggap sebagai indikator tertinggi atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah, namun kenyataannya opini tersebut tidak selalu mencerminkan tidak adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan keuangan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Paser, opini WTP telah berhasil diraih selama sepuluh tahun berturut-turut, namun tetap ditemukan berbagai catatan signifikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti kurang optimalnya pemungutan pajak daerah, kekurangan volume pekerjaan, dan kelebihan pembayaran atas belanja. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penilaian formal (opini BPK) dan kondisi substantif (permasalahan dalam praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan). Sayangnya, banyak penelitian sebelumnya hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan memperoleh opini WTP tanpa mengkritisi lebih jauh bagaimana kualitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sesungguhnya dalam proses penyusunan laporan keuangan (Rahayu et al., 2021).

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung melihat penerapan SAP secara normatif dan teoritis, tanpa mengaitkannya dengan dinamika teknis dan kelemahan implementatif yang terjadi di pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Paser. Kesenjangan penelitian muncul karena belum banyak kajian yang secara spesifik menelaah seberapa besar deviasi atau ketidaksesuaian antara ketentuan dalam SAP dengan praktik penyusunan LKPD di lapangan, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada kualitas informasi keuangan yang dihasilkan (Polyando, 2019). Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara lebih dalam penerapan SAP di Kabupaten Paser, bukan hanya dari segi peraturan atau kepatuhan administratif, tetapi juga dari segi substansi, efektivitas penerapan, dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang benar-benar berkualitas dan sesuai standar (Gunawan & Sujana, 2023).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Susanti & Andayani, (2021) dengan judul *"Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan"* yang dilakukan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan SAP berbasis akrua, kompetensi SDM, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Namun secara spesifik, penerapan SAP berbasis akrua sendiri tidak berpengaruh signifikan, sementara kompetensi SDM dan pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian kedua oleh Sari & Tamsir, (2023) berjudul *"Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto"* menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak

diberlakukannya PP No. 71 Tahun 2010, pemerintah daerah telah mengadopsi sistem informasi akuntansi yang lebih modern seperti SIA KEUDA, menggantikan penggunaan Excel. Hal ini berimplikasi positif terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan, peningkatan total aset, serta perbaikan aspek SDM, infrastruktur, dan pengembangan teknologi informasi.

Penelitian ketiga oleh Harun et al., (2022) dengan judul "*Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Government Governance*" menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada organisasi perangkat daerah di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAP dan sistem pengendalian intern mampu menjelaskan variabel *good government governance* sebesar 38,5%, menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ramadhan & Fahrani, (2024) dengan judul "*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu)*". Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasilnya menyimpulkan bahwa baik penerapan SAP berbasis akruaI maupun kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Batu, yang ditunjukkan dengan peningkatan keterandalan dan keakuratan dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian kelima oleh Linggupa, (2024) berjudul "*Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang*". Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa laporan keuangan Puskesmas Cibugel dari tahun 2018 hingga 2020 umumnya telah memenuhi kriteria SAP No. 13. Namun, penyusunan laporan tahun 2018 belum optimal karena masih terdapat sejumlah permasalahan yang segera diperbaiki pada periode berikutnya.

Kelima penelitian di atas menunjukkan adanya perhatian besar terhadap peran penting penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan faktor pendukung lainnya seperti kompetensi SDM, sistem informasi akuntansi, dan pengendalian intern dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Namun demikian, kesenjangan penelitian masih terlihat dalam konteks evaluasi menyeluruh atas temuan-temuan audit dan opini WTP yang tetap disertai dengan berbagai catatan dari BPK. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan fokus pada Pemerintah Kabupaten Paser, yang meskipun mendapatkan opini WTP secara konsisten, masih memiliki sejumlah permasalahan dalam penyajian laporan keuangan yang mengindikasikan potensi ketidaksesuaian dengan standar akuntansi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam mengkaji *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berbeda dari studi-studi terdahulu yang umumnya hanya menguji hubungan antara penerapan SAP, kompetensi SDM, dan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan secara kuantitatif atau deskriptif, penelitian ini secara eksplisit menyoroti inkonsistensi antara opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK dengan masih ditemukannya permasalahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kebaruan lainnya terletak pada fokus geografis dan institusional yang belum banyak dijadikan objek penelitian terdahulu, yaitu Kabupaten Paser. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah Sumatera dan Jawa, seperti Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Batu, atau Kabupaten Jeneponto. Kondisi lokal Kabupaten Paser yang memiliki kompleksitas tersendiri dari sisi pengelolaan sumber daya, geografis, dan struktur organisasi menjadikan penelitian ini penting untuk memperluas cakupan empiris penerapan SAP di Indonesia Timur, khususnya Kalimantan Timur.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji sejauh mana penerapan SAP memengaruhi kualitas laporan keuangan, tetapi juga secara mendalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penerapan standar tersebut dalam praktik. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini bersifat evaluatif dan diagnostik, sehingga memberikan nilai tambah praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan mereka.

Secara metodologis, penelitian ini juga mengombinasikan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Dengan mengintegrasikan analisis terhadap persepsi aparatur pengelola keuangan daerah, serta temuan audit dari BPK, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang lebih mendalam dan relevan dalam konteks kebijakan dan praktik akuntansi sektor publik. Oleh karena itu, perbedaan fokus wilayah, pendekatan analisis, dan eksplorasi terhadap faktor-faktor penghambat dalam implementasi SAP menjadi bukti dari kebaruan ilmiah yang ditawarkan oleh penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5. Tujuan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui serta menganalisis kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah; (2) mengidentifikasi serta memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan pada penyajian laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser; dan (3) mengetahui serta menganalisis sejauh mana tingkat signifikansi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Ardieansyah et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang lebih bersifat eksploratif dan kontekstual, yakni menggali fenomena yang terjadi di lapangan, terutama terkait kendala, pemahaman, serta implementasi SAP oleh aparatur pemerintah daerah. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mendalami makna dan pemaknaan informan terhadap praktik pelaporan keuangan berdasarkan SAP, serta mengungkap aspek-aspek yang tidak dapat terjangkau oleh pendekatan kuantitatif (Simangunsong, 2017).

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan dipilih berdasarkan posisi dan relevansinya terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser, karena memiliki kewenangan dan pengetahuan menyeluruh atas kebijakan dan implementasi SAP. Selain itu, Sekretaris BKAD, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, serta staf penyusun laporan dipilih sebagai informan tambahan untuk memperoleh pandangan teknis operasional dan kendala nyata di lapangan. Jumlah total informan adalah 10 orang, yang mewakili struktur fungsional dalam proses penyusunan laporan keuangan (Nurdin & Hartati, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, dimulai dari awal Februari hingga akhir Maret 2025. Lokasi penelitian berfokus pada kantor BKAD Kabupaten Paser, baik untuk observasi langsung maupun wawancara mendalam. Tahapan pengumpulan data mencakup observasi partisipatif terhadap aktivitas pelaporan keuangan, wawancara semi-terstruktur dengan informan yang telah ditentukan, serta dokumentasi terhadap dokumen-dokumen penting seperti laporan keuangan, hasil audit BPK, dan dokumen kebijakan internal terkait akuntansi pemerintahan.

Alasan digunakannya wawancara semi-terstruktur adalah agar peneliti memiliki fleksibilitas dalam menggali informasi sesuai dengan perkembangan temuan di lapangan, sekaligus menjaga fokus pertanyaan pada isu utama yang diteliti. Pendekatan induktif juga digunakan dalam analisis, agar kesimpulan yang dihasilkan berasal dari realitas empiris yang diamati dan bukan dari asumsi teoritis semata. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh, faktual, dan valid tentang bagaimana SAP diterapkan di Kabupaten Paser serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Kabupaten Paser menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2015. Peraturan ini disusun berdasarkan acuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, yang mengatur penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar nasional.

Laporan keuangan yang dihasilkan mencakup tujuh komponen utama: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Salah satu indikator kualitas laporan keuangan adalah kepatuhan terhadap SAP, yang menurut teori Sinurat (2018) harus memenuhi empat dimensi: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Paser Tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan melebihi target, mencapai 104,64%, sedangkan belanja hanya terealisasi sebesar 88,77%. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang efisien, meskipun perlu evaluasi terhadap penyerapan anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp676 miliar, menunjukkan kemampuan fiskal yang masih tersedia.

Selanjutnya, neraca keuangan mencerminkan posisi keuangan daerah dengan aset lancar seperti kas dan piutang. Laporan ini disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser sesuai dengan prinsip-prinsip SAP. Dengan penerapan standar akuntansi yang tepat, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Paser dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang efektif, baik untuk perencanaan pembangunan maupun pertanggungjawaban publik.

1. Relevan

Relevansi merupakan karakteristik utama yang menentukan sejauh mana informasi dalam laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Dalam konteks laporan keuangan pemerintah daerah, relevansi tercermin dari informasi yang memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bersama Kepala dan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser, diketahui bahwa penyusunan laporan telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman utama.

Informasi dalam laporan digunakan pimpinan daerah untuk mengevaluasi program yang berjalan (umpan balik) serta merencanakan kebijakan di masa mendatang berdasarkan tren keuangan yang ditampilkan (manfaat prediktif). Ketepatan waktu penyampaian laporan juga dijaga sesuai ketentuan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selain itu, laporan keuangan disusun secara lengkap, meliputi berbagai komponen seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Upaya pemerintah daerah dalam menyajikan informasi keuangan secara relevan menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Keseluruhan indikator relevansi telah diupayakan terpenuhi, meskipun tetap dilakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaporan secara berkelanjutan.

2. Andal

Keandalan informasi dalam laporan keuangan sangat penting agar data yang disajikan dapat dipercaya dan digunakan secara tepat. Keandalan berarti penyajian informasi harus jujur, sesuai fakta, dapat diverifikasi, dan bersifat netral. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser, laporan keuangan yang disusun telah memenuhi karakteristik keandalan tersebut.

Penyajian jujur diwujudkan dengan penyusunan laporan berdasarkan bukti transaksi yang akurat dan telah diverifikasi secara internal. Kepala Sub Bagian Keuangan BKAD menyatakan bahwa laporan sudah disusun dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, staf penyusun melakukan crosscheck data agar tidak terjadi kesalahan atau manipulasi data.

Karakteristik dapat diverifikasi juga dipastikan, dimana laporan keuangan dapat diuji kembali oleh pihak yang kompeten, dengan hasil yang konsisten. Sekretaris BKAD menegaskan bahwa semua angka dalam laporan didukung oleh bukti pendukung sehingga mudah diverifikasi. Aspek netralitas juga dijaga agar laporan tidak memihak kepentingan tertentu, melainkan objektif dan transparan. Kepala BKAD dan pejabat lainnya menegaskan bahwa laporan keuangan disusun secara adil sesuai standar SAP. Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Paser telah memenuhi unsur keandalan sesuai standar akuntansi pemerintah.

3. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus memiliki karakteristik dapat dibandingkan untuk mendukung evaluasi kebijakan dan pengambilan keputusan. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal berarti laporan keuangan

disusun dengan kebijakan akuntansi yang konsisten setiap tahun. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Transaksi BKAD Kabupaten Paser, Yulias Hartati, SE, menyatakan bahwa kebijakan akuntansi di Kabupaten Paser masih konsisten dengan SAP, meskipun akan ada penyesuaian sesuai kebutuhan. Staf penyusun laporan juga menegaskan bahwa konsistensi ini penting agar laporan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun, dan perubahan akan disampaikan secara transparan.

Perbandingan eksternal dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan Kabupaten Paser dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti tingkat PAD dan kondisi geografis. Hal ini membantu evaluasi dan benchmarking. Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Paser telah memenuhi kriteria dapat dibandingkan, baik secara internal maupun eksternal.

4. Dapat Dipahami

Laporan keuangan yang dapat dipahami artinya informasi disajikan dengan jelas dan terstruktur agar mudah dimengerti oleh pengguna laporan. Penyajian yang sederhana membantu pengambil keputusan memahami isi laporan dengan baik. Menurut Kepala BKAD Kabupaten Paser, Ibu Nur Asni, SE., MM, laporan keuangan sudah cukup mudah dipahami, terutama bila disusun sesuai standar dan dilengkapi grafik atau penjelasan tambahan. Sekretaris BKAD, Bapak Syahdani, S.Sos, juga menegaskan bahwa laporan disusun simpel dan jelas agar semua pengguna dapat mengerti maksudnya.

Staf penyusun laporan, Bapak Komarudin, menyatakan bahwa meskipun menggunakan standar teknis, mereka selalu menambahkan penjelasan supaya laporan lebih mudah dipahami, terutama bagi yang tidak berlatar belakang keuangan. Kesimpulannya, penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan di Kabupaten Paser membuat laporan keuangan cukup mudah dipahami dan dapat menjadi pedoman yang valid dalam pengambilan keputusan serta evaluasi keuangan daerah.

3.2 Faktor Penghambat dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan Laporan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Penelitian menunjukkan dua faktor utama yang menghambat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Paser, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berkompeteren dan kurangnya kesadaran entitas terkait. Pertama, BKAD Kabupaten Paser memiliki staf penyusun laporan yang terbatas. Hal ini menyebabkan beban kerja tidak merata, di mana setiap staf harus menangani berbagai tahapan mulai dari pengumpulan data, verifikasi dokumen, hingga penyusunan laporan sesuai SAP. Kondisi ini berpengaruh pada efektivitas kerja, akurasi data, dan ketepatan waktu pelaporan. Kepala BKAD, Ibu Nur Asni, SE., MM, menegaskan bahwa kurangnya staf memengaruhi kinerja penyusunan laporan dan menyebabkan keterlambatan serta penurunan efisiensi.

Kedua, terdapat kurangnya disiplin dan kesadaran pegawai di OPD terkait dalam mengumpulkan data keuangan secara tepat waktu dan lengkap. Hal ini menghambat proses konsolidasi data di BKAD dan berdampak pada ketepatan waktu penyusunan laporan. Sekretaris BKAD, Bapak Syahdani, S.Sos, menyampaikan bahwa keterlambatan data dari OPD menjadi tantangan besar dalam pelaporan. Staf penyusun laporan juga mengungkapkan kesulitan akibat data yang terlambat masuk, sehingga pekerjaan mereka turut terhambat. Kesimpulannya, kekurangan SDM dan ketidakdisiplinan OPD dalam penyampaian data merupakan hambatan signifikan yang harus

diatasi untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Paser.

3.3 Upaya yang Dilakukan untuk Menghadapi Faktor Penghambat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Kabupaten Paser menyadari bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menjadi hambatan utama dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kekurangan ini mencakup aspek kuantitatif, yakni jumlah pegawai yang minim, serta aspek kualitatif, yaitu rendahnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip SAP dan penguasaan sistem informasi akuntansi. Dampaknya terlihat pada keterlambatan pelaporan dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Paser telah mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan perguruan tinggi untuk memperkuat pemahaman SAP serta penguasaan aplikasi keuangan daerah. Kedua, memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan profesional agar pegawai dapat mengikuti sertifikasi kompetensi yang relevan, seperti sertifikasi akuntansi pemerintahan. Ketiga, melakukan evaluasi sistem rekrutmen dan pengembangan karier ASN dengan prioritas pada pelamar berkemampuan di bidang akuntansi dan sistem informasi, sekaligus memberikan insentif bagi pegawai berprestasi. Keempat, memperbarui dan mengintegrasikan sistem informasi keuangan yang lebih user-friendly dengan pendampingan teknis intensif.

Selain itu, Pemkab Paser juga menghadapi kurangnya kesadaran OPD terkait pelaksanaan SAP. Untuk itu, dilakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan melalui seminar, forum diskusi, dan penyebaran materi edukatif yang mudah dipahami. Peningkatan peran kepala OPD juga menjadi fokus, dengan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab mereka sebagai penggerak pelaksanaan SAP dan memasukkan pelaksanaan SAP dalam evaluasi kinerja OPD. Selanjutnya, dibentuk tim pendamping akuntansi daerah yang bertugas memberikan solusi langsung dan meningkatkan komunikasi antar unit kerja. Dengan upaya-upaya tersebut, Pemkab Paser berharap dapat mengoptimalkan penerapan SAP secara konsisten, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah demi pelayanan publik yang lebih baik.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Pemerintah Kabupaten Paser terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta kurangnya kesadaran dan disiplin entitas terkait dalam pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Sari dan Nugroho (2020), yang menyatakan bahwa keterbatasan jumlah dan kualitas SDM menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan SAP di pemerintahan daerah. Hal ini menguatkan bahwa permasalahan SDM merupakan faktor krusial yang memengaruhi efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah.

Namun, berbeda dengan penelitian Ramadhan (2018) yang menyoroti kendala teknis sistem informasi sebagai hambatan utama, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sistem informasi masih perlu diperbaiki, aspek SDM dan disiplin pengumpulan data oleh OPD lebih dominan menjadi penghambat. Temuan ini memperkuat pendapat dari Wulandari (2019) yang menekankan pentingnya sinergi antara kualitas SDM dan disiplin organisasi dalam mendukung akuntabilitas keuangan daerah.

Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan hasil studi oleh Sinurat et al., (2023) yang mengemukakan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi strategi utama dalam mengatasi hambatan penerapan SAP. Pemerintah Kabupaten Paser telah mengimplementasikan langkah-langkah serupa, seperti pelatihan berkala dan sertifikasi kompetensi, yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya penguatan kapasitas SDM.

Temuan ini menolak sebagian hasil penelitian Nurhadi (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan yang kurang jelas dan sering berubah menjadi penghambat utama, karena dalam konteks Kabupaten Paser, kebijakan akuntansi relatif konsisten meskipun disertai penyesuaian sesuai situasi. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas kebijakan dapat memberikan ruang bagi peningkatan pemahaman dan implementasi SAP.

Dengan demikian, diskusi ini memperlihatkan bahwa temuan penelitian memperkuat beberapa temuan sebelumnya terkait pentingnya kualitas SDM dan disiplin organisasi, namun juga menunjukkan bahwa faktor teknis dan kebijakan memiliki peran yang berbeda-beda tergantung karakteristik objek penelitian. Oleh karena itu, intervensi yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM dan penguatan koordinasi antar entitas dinilai lebih efektif dalam konteks Kabupaten Paser.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain faktor penghambat utama yang sudah dibahas, penelitian ini menemukan adanya faktor pendukung signifikan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kabupaten Paser, yaitu komitmen pimpinan OPD dalam mendorong pelaksanaan SAP. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2019) yang menyatakan bahwa kepemimpinan aktif dan dukungan dari pimpinan unit kerja dapat meningkatkan motivasi staf dalam menjalankan standar akuntansi dengan baik. Komitmen pimpinan di Kabupaten Paser terlihat dari upaya mereka memberikan arahan dan pengawasan yang rutin, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan pelaporan keuangan.

Selanjutnya, terdapat temuan menarik terkait peran teknologi informasi dalam mendukung proses pelaporan keuangan. Meski masih ada tantangan dalam penguasaan sistem oleh sebagian pegawai, penggunaan perangkat lunak keuangan telah membantu mempercepat dan meningkatkan akurasi penyusunan laporan. Temuan ini memperkuat hasil studi Wibowo et al., (2023) yang menyebutkan bahwa penerapan teknologi informasi merupakan faktor pendukung yang krusial dalam meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya kendala komunikasi antar OPD yang kadang menjadi penyebab terlambatnya pengumpulan data keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Subechan et al., (2014) yang menekankan bahwa koordinasi antar entitas menjadi faktor penting untuk memastikan kelancaran pelaporan keuangan. Oleh karena itu, peningkatan mekanisme komunikasi dan kolaborasi antar OPD sangat diperlukan untuk mengatasi

hambatan ini. Dengan demikian, temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SAP tidak hanya bergantung pada faktor SDM dan kebijakan, tetapi juga pada kepemimpinan, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi yang efektif antar unit kerja.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah berjalan sesuai ketentuan formal, terutama dibuktikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut. Namun, penerapan SAP tersebut belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang belum maksimal, serta rendahnya kesadaran beberapa entitas pelaporan akan pentingnya kepatuhan terhadap SAP.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah menunjukkan kemajuan pada dimensi relevansi, keandalan, kemudahan pemahaman, dan kemampuan dibandingkan, meskipun belum konsisten di seluruh perangkat daerah. Faktor penghambat seperti kurangnya pelatihan teknis dan minimnya koordinasi antar OPD turut memengaruhi hal ini.

Pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan berbagai upaya strategis seperti penerbitan regulasi kebijakan akuntansi, pelatihan berkala, dan penguatan koordinasi antar unit pelaporan. Namun, upaya tersebut perlu ditingkatkan secara lebih sistematis dan masif untuk memperkuat budaya akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah secara menyeluruh.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, sehingga hasilnya mungkin kurang mewakili kondisi di perangkat daerah lain atau daerah lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, keterbatasan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen resmi menyebabkan adanya potensi bias subjektif dari narasumber serta keterbatasan dalam pengukuran aspek kuantitatif penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Waktu penelitian yang terbatas juga membatasi kemampuan penulis untuk melakukan pengamatan jangka panjang dan analisis mendalam terhadap dinamika implementasi SAP secara menyeluruh. Oleh karena itu, temuan penelitian ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih variatif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian sebaiknya difokuskan pada pengembangan studi komparatif yang melibatkan beberapa daerah dengan karakteristik berbeda untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di tingkat regional maupun nasional. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih, seperti sistem akuntansi berbasis cloud dan otomatisasi pelaporan keuangan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelaporan. Selain

itu, penting untuk mengkaji faktor budaya organisasi dan kepemimpinan dalam mendukung keberhasilan implementasi SAP, serta melakukan evaluasi dampak pelatihan dan sertifikasi kompetensi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Dengan pendekatan multidisipliner dan penggunaan metode penelitian campuran, penelitian masa depan diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang lebih terintegrasi dan aplikatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1 ed.). Deepublish.
- Arifyanti, Y. R., & Komedi. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. In *eprint IPDN* (Vol. 11, Nomor 1). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17925>
- Grassa, R. (2020). Do ownership structures affect risk disclosure in Islamic banks? International evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(3), 369–391. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2020-0036>
- Gunawan, I. B. A., & Sujana, E. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 824–837. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.64893>
- Harun, M. I., Mamulati, I., & Teapon, A. M. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pulau Taliabu. *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (Jssh)*, 2(2), 16–22. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1344>
- Linggupa, R. A. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan Sesuai Psap No.1 Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Manado. *Jurnal Ilmiah*, 5(1), 1–23. <https://jurnal.prisma.ac.id/index.php/equil/article/view/229/63>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*.

Media Sahabat Cendekia. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>

- Rahayu, V. D., Zulfa, K., & Wijayanti, I. (2021). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 6(1999), 1–13. <https://doi.org/10.33627/pk.v2i1.127>
- Ramadhan, R., & Fahrani, U. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 229–247. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3638>
- Rounaghi, M. M. (2019). Economic analysis of using green accounting and environmental accounting to identify environmental costs and sustainability indicators. In *International Journal of Ethics and Systems* (Vol. 35, Nomor 4, hal. 504–512). <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2019-0056>
- Sari, P., & Tamsir. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 784–791. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.4046>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. IPDN PRESS.
- Sinurat, M., Elsy, R., Setyono, G., Ansari, S., & Fatati, K. (2024). *Optimization Of Regional Levy Revenue , In The City Of Surabaya , East Java Province*. 13(03), 336–351. <https://infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/2505>
- Sinurat, M., Putri, R. S. S., Sinaga, W., & Johannes, A. W. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 10(1), 89–105. <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i1.3417>
- Subechan, Hanafi, I., & Haryono, B. S. (2014). Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus. *Wacana*, 17(1), 1–12. <https://www.neliti.com/id/publications/40086/analisis-faktor-faktor-penyebab-keterlambatan-penetapan-apbd-kabupaten-kudus#cite>
- Susanti, N. D., & Andayani, W. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v7i1.1992>
- Wibowo, D. A., Sasanti, E. E., & Nurabiah, N. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah pada Bappeda Kota Mataram. *Jurnal*

Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram, 9(2), 279–287. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v9i2.528>

Yanto, R. (2023). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan* [IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14660>

Zuo, Z. (2022). Government R&D subsidies and firm innovation performance: The moderating role of accounting information quality. *Journal of Innovation and Knowledge*, 7(2). <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100176>

